

Saan Mustopa Minta Nasdem di Kab. Bogor Jangan Jadi Ormas

CIBINONG (IM)- Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa melakukan rapat konsolidasi pemenangan pemilu 2024 di Kabupaten Bogor.

Saan Mustopa pun memberikan target kepada jajarannya di Bumi Tegar Beriman untuk menjadi Partai Nasdem dan bukannya organisasi masyarakat (Ormas), caranya meraih 7 kursi dari total 55 kursi DPRD Kabupaten Bogor.

“Pemilihan legislatif (Pileg) 2014 Partai Nasdem dapat 3 kursi DPRD Kabupaten Bogor, dan Pileg 2019 tidak meraih kursi. Oleh karena itu, kami tak ingin Partai Nasdem kembali menjadi ‘Ormas’ karena tidak memiliki anggota legislatif dan kedepan saya minta DPD Partai Nasdem Kabupaten Bogor meraih 7 kursi DPRD Kabupaten Bogor,” kata Saan Mustopa di Hotel Royal Safari Garden, Cisarua, Kamis (10/8).

Pria yang juga anggota DPR-RI ini yakin DPD Partai Nasdem Kabupaten Bogor dan para Calegnya bisa meraih target 7 kursi DPRD Kabupaten Bogor, karena jajarannya sudah melakukan 2/3 perjalanan. “Struktur Partai Nasdem sudah bagus, Calegnya bagus dan kompetitif baik di internal maupun eksternal, lalu terbentuk relawan, saksi

serta lainnya. Hingga kini tinggal melangkah 1/3 lagi ‘perjalanan’ untuk mencapai tujuan atau target,” sambungnya.

Saan juga berharap, struktur Partai Nasdem bersama Caleg DPRD Kabupaten Bogor, DPRD Jawa Barat dan DPR-RI untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam Pileg dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024 mendatang.

“Kami juga menargetkan 2 kursi DPRD Jawa Barat dan 2 kursi DPR-RI dari daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Bogor, oleh karena itu semua pihak harus berkolaborasi, bersinergi dan saling menguatkan,” harap Saan.

Ia pun yakin, bahwa Partai Nasdem bisa meraih targetnya di Kabupaten Bogor. Hal itu karena bakal ada efek jang Pilpres, di mana Anies Baswedan menjadi Capres Partai Nasdem bersama PKS dan Partai Demokrat.

“Sesuai hasil survey, Anies Baswedan yang diusung sebagai Capres oleh Partai Nasdem banyak diterima masyarakat di kota dan kabupaten di Jawa Barat, apalagi di Kabupaten Bogor. Kami optimis,” tukasnya. ● **pra**

Satpol PP Tertibkan PSK Michat di Kolong Fly Over Cibinong

CIBINONG (IM)- Satpol PP Kabupaten Bogor menertibkan 11 wanita dari sebuah indekos di bawah fly over Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Setelah dilakukan pemeriksaan, empat orang di antaranya merupakan pekerja seks komersial (PSK) yang menjajakan diri lewat aplikasi Michat.

Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor, Iman W. Budiana, mengatakan razia tersebut dilakukan dalam penertiban penyakit masyarakat pada Rabu (9/8) malam hingga Kamis (10/8) dini hari. Tempat yang menjadi sasaran ialah fly over di Kecamatan Cibinong dan Blok Anggrek, Gang Cokelat di Kecamatan Cileungsi.

Di bawah Fly Over Cibinong, kata Iman, pada sebuah rumah indekos dan ditemukan 11 orang perempuan diduga Wanita Tuna Susila (WTS), yang menjajakan diri melalui aplikasi online. Kemudian 11 wanita tersebut dibawa ke Mako Satpol PP Kabupaten Bogor, untuk dilanjutkan dan diserahkan ke pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor untuk dilaksanakan asesmen hingga Kamis pagi. “Dari hasil asesmen Dinsos, yang dinyatakan positif sebagai PSK online

itu ada empat orang dari 11 orang,” kata Iman dikonfirmasi, Kamis (10/8).

Iman mengatakan, empat PSK yang terbukti melakukan praktik kegiatan tersebut, kemudian dibawa ke Panti Rehabilitasi di wilayah Cibadak, Kabupaten Sukabumi oleh Dinsos Kabupaten Bogor. Empat wanita itu nantinya akan dilakukan proses pembinaan.

Lebih lanjut, Iman menyebutkan, penertiban ini dilakukan berdasarkan aduan masyarakat yang diterima Petugas dan ditindaklanjuti Satpol PP Kabupaten Bogor. Petugas pun berangkat dengan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 300.1.2 / 1155 Tibum Pertanggal 9 Agustus 2023. “Tidak ada kendala dalam kegiatan tersebut. Kegiatan berjalan dengan lancar, aman dan terkendali sesuai rencana,” ujarnya.

Tak hanya di Kecamatan Cibinong, Iman mengatakan, petugas juga berangkat ke Kecamatan Cileungsi. Di mana sasaran petugas ialah Gang Anggrek dan Gang Cokelat Kecamatan Cileungsi.

“Namun dari hasil penindakan tidak ditemukannya sasaran operasi atau nihil,” ucapnya. ● **gio**

Lomba Gerak Jalan Sehat Meriahkan HUT ke-24 DWP Kabupaten Bogor



Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin membuka lomba gerak jalan sehat memeriahkan HUT ke-24 DWP Kabupaten Bogor.

BOGOR (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bogor menggelar kegiatan Lomba Gerak Jalan Sehat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 DWP Kabupaten Bogor tahun 2023.

Kejuaraan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin di Stadion Pakansari, Cibinong, Rabu (9/8).

Sedikitnya, 352 peserta dari 32 regu kategori DWP Perangkat Daerah dan 429 peserta dari 39 regu kategori Kecamatan turut serta menjadi peserta lomba gerak jalan sehat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 DWP Kabupaten Bogor tahun 2023.

Dari 71 regu kategori PD dan Kecamatan yang mengikuti perlombaan lomba gerak jalan sehat, diperoleh para pemenang yakni, kategori PD juara 1 dimenangkan

oleh RSUD Cibinong, juara II DPUPR Kabupaten Bogor, dan Juara III DP3AP2KB. Lalu juara harapan I diperoleh DPMD Kabupaten Bogor, harapan II Satpol PP dan harapan III Setda Kabupaten Bogor.

Silaturahmi merapatkan banisan untuk melangkah bersama menjalankan tugas mulia DWP dalam meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga ASN serta berkontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan nasional,” imbuhnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut yakni, Ketua DWP Kabupaten Bogor, Nurhayati, Penasehat DWP Kabupaten Bogor, Halimatussadiyah Iwan, Ketua Bhayangkari Bogor, Ketua Persis Chandra Kirana, Ketua IKA DPRD Kabupaten Bogor, Ketua GOW Kabupaten Bogor, Ketua IWAPI Kabupaten Bogor, Kepala Perangkat Daerah (PD) se-Kabupaten Bogor, Camat se-Kabupaten Bogor dan lainnya. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

KAWASAN EKOSISTEM GREEN ENERGI TERLENGKAP

Pengendara melintas di Kawasan Bendungan Cirata, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (10/8). PT PLN Nusantara Power mencatat, kawasan Cirata akan menjadi ekosistem green energi terlengkap di Indonesia karena memiliki PLTA Cirata dengan total kapasitas 1.008 MW terbesar se Indonesia serta PLTS 1 MW tipe thin film serta akan memiliki PLTS apung 145 MW ac.

RSUD Bogor Utara Kebutuhan Dasar, Begini Solusi Pembiayaannya versi Kang AW

Pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Bogor, merupakan kebutuhan dasar, hingga harusnya tidak mengandalkan Bankeu dari Pemrov Jawa Barat,” kata Asep Wahyuwijaya.

CIBINONG (IM)- Legislator DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya mengkritisi kebijakan Pemkab Bogor dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya soal pembangunan RSUD Bogor Utara.

Seperti diketahui, Pemkab Bogor kembali mengajukan permohonan atau proposal bantuan keuangan (Bankeu) ke Pemrov Jawa Barat untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp206 miliar untuk pembangunan tahap II RSUD Bogor Utara atau Parung.

Namun, karena beberapa alasan dan sesuai data Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Barat, proposal Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara tersebut dikembalikan atau ditolak.

“Pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung yang masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Bogor merupakan kebutuhan dasar, hingga harusnya tidak mengandalkan Bankeu dari Pemrov Jawa Barat,” kata

Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Kamis (10/8).

Asep Wahyuwijaya menuturkan bahwa harusnya anggaran bantuan keuangan infrastruktur desa atau satu milyar satu desa (Samisade) atau program kerja lainnya yang bukan kebutuhan dasar dirasionalisasi, hingga Pemkab Bogor pun dapat menganggarkan pembangunan tahap II RSUD Bogor Utara atau Parung.

“Ini tentang manajemen kelola keuangan daerah, mana yang masuk ke dalam kewenangan Pemkab dan mana yang merupakan kewenangan pemerintah desa atau mana yang kebutuhan dasar dan yang bukan. Saya yakin, dengan besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dilakukan beberapa langkah efisiensi, Pemkab Bogor sanggup membiayai secara mandiri pembangunan RSUD di Desa Cograek, Parung tersebut,” tuturnya

Ia juga meminta Sekda

Kabupaten Bogor Burhanudin untuk tidak menjadi politisi terkait komentarnya, bahwa pembangunan RSUD Parung merupakan janji Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Sekda sebaiknya jangan jadi politisi, karena janji Gubernur itu kan semuanya harus tertuang di dalam RPJMD, misalnya seperti pembangunan jalan khusus tambang. Saya ini salah satu Pimpinan Pansus saat RPJMD Jabar 2018-2023 dibuat dan anggota Pansusnya juga saat revisi RPJMD dilakukan pada tahun 2021, secara tegas setuju saya tidak ada nomenklatur RSUD Parung dalam dokumen RPJMD Jawa Barat. Secara naratif, soal penanganan kesehatan pasca covid memang jadi skala prioritas dan secara artikulatif saya pribadi memandang bahwa bantuan untuk pembangunan RSUD Parung bisa turut didorong dan dibantu sebagai perwujudan dari skala prioritas

penanganan kesehatan pasca covid tadi hanya tidak secara imperatif pembangunan RSUD Parung saat itu harus terus dibantu,” pintanya.

Kang AW sapaan akrabnya menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat tidak punya kewajiban pembangunan RSUD Parung. Kalau pun sekarang dengan dalih pernah dijanjikan oleh Gubernur Ridwan Kamil bahwa bantuan RSUD Parung akan tetap diberikan, dasarnya pun apa?

“Secara tekstual RPJMD Jawa Barat itu akan selesai dan habis masa berlakunya tahun 2023 ini. Sementara yang kita bahas adalah agenda kegiatan untuk tahun anggaran 2024. Padahal bulan depan, Ridwan Kamil pun sudah bukan lagi Gubernur. Terus, dia masih dituntut untuk memberikan bantuan untuk pembangunan RSUD Parung? Saya tegaskan Gubernur bukan sinterklas. Semua harus ada aturan mainnya,” tegas Kang AW. ● **pra**

Sekda Burhanudin Ucapkan Selamat ke 30 Capaska Terpilih

BOGOR (IM)- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengucapkan selamat kepada 30 orang Calon Paskibraka (Capaska) yang lolos seleksi, dan mengikuti kegiatan Pemusatan Pendidikan.

Hal tersebut dikatakan Burhanudin saat mewakili Plt. Bupati Bogor, membuka kegiatan Pusdiklat Paskibraka tahun 2023, di Hotel Grand Pesona, Caringin, Rabu (9/8).

Hadir pada acara tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), perwakilan Forkopimda Kabupaten Bogor, perwakilan Lanud Atang Sendjaja, para pamong, pelatih, fasilitator Pusdiklat Paskibraka, ketua serta jajaran pengurus dan anggota Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bogor.

Sekda Burhanudin menjelaskan, program pembentukan Paskibraka tahun 2023 ini dilaksanakan dengan mekanisme yang sangat ketat dan transparan.

Seluruh tahapan seleksi dilakukan menggunakan aplikasi transparansi Paskibraka yang berlaku secara nasional, serta diawasi langsung oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada tim seleksi, fasilitator, pelatih dan pamong, yang berperan dalam memilih, mendidik, melatih, serta membina adik-adik calon Paskibraka demi terbentuknya Paskibraka Kabupaten Bogor yang tangguh, berkualitas dan berkarakter Pancasila,” tutur Sekda Burhanudin.

Selanjutnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor, Bambang W. Tawekal mengungkapkan, penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu dari tiga tahapan pembentukan Paskibraka Kabupaten Bogor tahun 2023.

“Capaska yang hadir saat ini berjumlah 30 orang yang terpilih dari sekitar 1.296 pendaftar dari tingkat SLTA sederajat di wilayah Kabupaten Bogor,” ungkap Bambang.

Bambang menerangkan, mereka akan mengikuti kegiatan Pusdiklat Paskibraka mulai tanggal 9 hingga 18 Agustus 2023 di Hotel Grand Pesona dan Lapangan Tegar Beriman. Tujuannya untuk membentuk sikap disiplin, menjunjung tinggi nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, serta peningkatan wawasan kebangsaan.

Memiliki karakteristik serta jiwa Pancasila dan UUD 1945, memiliki sikap kepemimpinan, patriotisme, nasionalisme, dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki kemampuan teknis Paskibraka,” terangnya. ● **gio**



Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin menyematkan pin ke salah satu Calon Paskibraka (Capaska) yang lolos seleksi.

Komisi I DPRD Kota Bogor Pastikan Anggaran di Wilayah Naik

BOGOR (IM)- Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono memastikan bahwa anggaran di wilayah naik. Salah satu kenaikan anggaran di sektor pos BOP untuk RT, RW dan LPM di wilayah.

Hal itu terungkap dalam pembahasan KUA-PPAS 2024 dengan membedakan anggaran di wilayah, Rabu (9/8), dalam rapat kerja bersama SKPD dan Camat se-Kota Bogor,

“Alhamdulillah aspirasi pengurus wilayah dapat direalisasikan. Meski hanya mengalami kenaikan Rp50 ribu per orang, namun ini sudah menjadi sinyal bagus dan semoga kedepannya bisa ditambah lagi,” ungkap Heri di gedung DPRD Kota Bogor pada Kamis (10/8).

Heri menuturkan, sebagai contoh, di Kecamatan Bogor Utara anggaran yang disiapkan untuk BOP RT, RW dan LPM sebesar Rp3 miliar. Nantinya anggaran ini akan dibagikan ke pengurus RT, RW dan LPM yang jumlahnya mencapai 681 orang. “Saya berharap dengan adanya kenaikan dana BOP ini, dapat menjadi penyemangat bagi para pegrurus di wilayah,” tuturnya.

“Ini merupakan bentuk apresiasi kami untuk para pengurus wilayah dan kami harap dapat meningkatkan semangat para pengurus di wilayah,” tambah Heri.

Heri membeberkan, dalam rapat pembahasan KUA-PPAS 2024, anggaran di tingkat Kecamatan dan Kelurahan juga mengalami kenaikan. Meski tidak dapat merinci,

namun Heri memastikan pemerataan pembangunan di wilayah terluar Kota Bogor akan dirasikan di 2024 nanti.

“Tentunya kami ingin memastikan anggaran yang ada di Kota Bogor ini bisa dirasakan oleh seluruh wilayah yang ada di Kota Bogor sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di tengah Kota Bogor saja,” beber politisi Golkar ini.

Heri memaparkan, perihal kenaikan BOP RT, RW dan LPM ini mulai menemukan titik terang saat dilaksanakannya Musrenbang Tingkat Kecamatan Bogor Utara di awal 2023.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto meminta agar diakhir periode kepemimpinannya, Wali Kota Bima Arya dapat menaikkan insentif untuk pengurus wilayah seperti RT RW.

“Saya sampaikan ke Pak wali saat itu, kami sangat terbantu oleh kinerja ujuang tombak di wilayah RT, RW, LPM, kader Po-syandu, Posbindu dan lain sebagainya, merupakan suksesor dari program pelayanan dan pembangunan. Tapi sudah hampir 6 tahun ini belum naik insentifnya. Jadi di RAPBD 2024 sebagai tahun terakhir perencanaan dari Pak Wali dan DPRD periode ini, kita perlu berikan apresiasi untuk beliau-beliau,” tegas Atang.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya meminta kepada Kepala Bappeda untuk menghitung dan merumuskan kenaikan BOP yang bisa dianggarkan. ● **jay**